

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Machmud, M. (2016). Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. *Research Report*.

Saleh, S. (2017). Analisis data kualitatif. Pustaka Ramadhan.

Nasdian, Fredian Tonny. (2014). Pengembangan Masyarakat (Ed.1). Jakarta: yayasan pustaka obor Indonesia.

Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Syafrizal, S., ... & Susilawaty, A. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan*. Yayasan Kita Menulis.

Rauf, Rahyunir dan Munaf, Yusri. (2015). Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia. Pekanbaru: Zanafa Publishing.

Suparno. (2017). Impelementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek. Dwiputra Pustaka Jaya.

Adi, Fahrudin. (2012). Pengantar Kesejahteraan Sosial. Bandung: Refika Aditama

Skripsi:

Indriyani, I. (2022). *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Muara Basung Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Jupriadi, J. (2022). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Dalam Perencanaan Pembangunan Dikelurahan (Studi Pada Kelurahan Pangkalan Lesung Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Putri, B. D. (2021). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Simpang Kubu Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).

Rosni, R. (2021). *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Medan Denai Kota Medan Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Kurniawan, A. (2020). *EFEKTIVITAS PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DESA UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (Studi tentang Peranan Rukun Tetangga di Desa Bawang Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang)* (Doctoral dissertation, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

SURASTYAWAN, Y. (2016). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN WAY KANAN (Studi Pada Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Register 24 Bukit Punggur).

Jurnal:

Ariadi, Andi. 2019. Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*. Volume 2, Nomor 2. Halaman 135-147.

Deswimar, D. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat desa dalam pembangunan pedesaan. *Jurnal El-Riyasah*, 5(1), 41-52.

Fratama, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Fisik di Desa Telaga Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. *Journal Ilmu Pemerintahan*, 59(11), 61-74.

Firdaus, R. (2020). Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara. *Journal I La Galigo: Public Administration Journal*, 3(1), 31-40.

Mamudji, S. (2017). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194-209.

Suparmoko, Muhammad. 2020. Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*. Volume 9, Nomor 1, Halaman 39-50.

Sulaeman, E. S., Murti, B., & Waryana, W. (2015). Peran Kepemimpinan, Modal Sosial, Akses Informasi serta Petugas dan Fasilitator Kesehatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 9(4), 353-361.

Sururi, A. (2015). Pemberdayaan masyarakat melalui program pembangunan infrastruktur perdesaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 3(2).

Muslim, A. (2017). Analisis kegagalan program nasional pemberdayaan masyarakat dalam membangun kemandirian masyarakat miskin (studi kasus di

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur). *Jurnal Penyuluhan*, 13(1), 79-87.

Ramdhani, Abdullah dan Ramdhani, M. Ali. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*. Volume 11, Nomor 01, Halaman 1-12.

Karyana¹, A., & Aisyah, S. SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN LEMBAGA ADAT DI DESA SIPAK KECAMATAN JASINGA KABUPATEN BOGOR.

Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan

Website:

Lahirnya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

<https://argamulya.desa.id/berita/detail/-lahirnya-uu-no-6-tahun-2014-tentang-desa-> (diakses pada, Mei 2023)

Kecamatan Nanggung Dalam Angka 2022. <https://bogorkab.bps.go.id/> (diakses pada, Maret 2023)

Indeks Pembangunan Desa. <https://www.bps.go.id> (diakses pada, Maret 2023)

Indeks Desa Membangun. <https://idm.kemendesa.go.id/view/detil/1/tentang-idm> (diakses pada, Juli 2023)

Optimalkan Program Penanggulangan Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bogor Turun Tajam. <https://bogorkab.go.id/post/detail/optimalkan-program-penanggulangan-kemiskinan-tingkat-kemiskinan-di-kabupaten-bogor-turun-tajam> (diakses pada, Juli 2023)

Letak Geografis. <https://bogorkab.go.id/pages/letak-geografis> (diakses pada, Juli 2023)

Indeks Pembangunan Desa Kabupaten Bogor Lampau Target RPJMD 2023.
<https://bogorkab.go.id/post/detail/indeks-pembangunan-desa-kabupaten-bogor-lampau-target-rpjmd-2023> (diakses pada, Juli 2023)

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-menteri-dan-peraturan-gubernur--mana-yang-lebih-tinggi-1t5f8a7b2632b1e/> (diakses pada, Agustus 2023)